

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Amiruddin, dan Zaina Asikin, 2006, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ayuningtyas, Dumilah, 2014, *Kebijakan Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung

Hadjon, Phillipus M., 2007, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta

Marbun, S.F., 2018, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, FH UII Press, Yogyakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Mukti, Ali Ghufro dan Moertjahjo, 2010, *Sistem Jaminan Kesehatan (Konsep Desentralisasi Terintegrasi)*, Karya Husada Mukti, Yogyakarta

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono dalam Mulia Kurniawati, 2013, *Pengawasan Terhadap Pelayanan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Apotek Oleh Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

-----, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Press, Jakarta

-----, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, CV Remadja Karya, Bandung

-----, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Cetakan V, Citra Aditya Bakti, Bandung

-----, 2007, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

-----, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Sutedi, Adrian, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta

Hasil Penelitian:

Anwar, Hanip, 2017, *“Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Faris, Ahmad Thib, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Medis Yang Dilakukan Oleh Dokter*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Haryati, Dwi, 2009, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu*, Publikasi Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Maryati, Dwi, 2012, *“Pelaksanaan Pengawasan Perlindungan Konsumen Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Kasus Peredaran Obat, Makanan dan Minuman, Kosmetik dan Obat Tradisional Ilegal di Sumatra Barat (Studi Kasus Toko AMD Azis)”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Rosmalia, Elva Noor Endah, 2017, *“Pengawasan (Peredaran Obat Secara Online) oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Yulinar, 2010, *“Implementasi Pengawasan Obat Keras (Daftar G) di Jalur Illegal (Studi Kasus Obat Keras (Daftar G) di Toko Obat Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat)”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Internet:

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan Aman, 2015

Badan POM, *158 Jenis Produk Obat Golongan Psikotropika dan Obat Keras Disita dari Toko Obat di Tangerang*, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/7517/158-Jenis-Produk-Obat-Golongan-Psikotropika-dan-Obat-Keras--Disita-dari-Toko-Obat-di-Tangerang.html>, pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 10.40 WIB

Kabar5.com, *Razia di Tangerang, BPOM Sita 207 Obat Keras dan Kosmetik Ilegal*, diakses dari <http://kabar5.com/razia-di-tangerang-bpom-sita-207-obat-keras-dan-kosmetik-ilegal/> pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 10.45 WIB

Latifah Putri Lestari, 2015, *Penggolongan Obat berdasarkan Undang-Undang*, <https://latiefahputrilestari.wordpress.com/2015/04/16/penggolongan-obat-berdasarkan-undang-undang/> diakses pada 19 Mei 2018

Raharja, Ivan Fauzani, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Inovatif Volume VII Mei 2014, diakses pada tanggal 24 Juli 2019

Syamsuni, 2005, *Farmasetika Dasar & Hitungan Farmasi*, Jakarta, Buku Kedokteran EGC,
<http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-obat-dan-penggolongan-obat.html> diunduh tanggal 19 Mei 2018

Setiadi, Wicipto Setiadi, 2009, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia hlm. 603, diakses pada tanggal 3 Juli 2019 pukul 13.09 WIB

Aswanto.Yadyn Abdul Razak, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, Program pascasarjana Universitas Hasanudin, hlm. 8, diakses pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.06 WIB

Zaenal Abidin, *Ini Perbedaan Toko Obat dan Apotek*,
<http://farof.blogspot.co.id/2016/11/ini-perbedaan-toko-obat-berizin-dan.html> diakses pada 19 Mei 2018

Peraturan Perundang-undangan:

Ordonansi Obat Keras (*Sterkwerkende Geneesmiddelen Ordonantie*, *Staatsblad* 1949:419)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/Kab/B.VII/72 Tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/Kab/B.VII/72 Tentang Pedagang Eceran Obat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276)

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Republik Indonesia Nomor 264A/MENKES/SKB/VII/2003 Dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 Tentang Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Dibidang Pengawasan Obat Dan Makanan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar, 2008, Kemenkes RI, Jakarta

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 636)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 783)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di

Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784)

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 tahun 2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 88)